



## Taman Iptek Harus Minim Bangunan

**YOGYA, TRIBUN** - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta meminta rencana pembangunan *science park* atau taman ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) tetap memperhatikan sisi ekologis atau lingkungan. Hal ini menjadi sangat penting karena ruang terbuka hijau yang masih minim di Kota Yogyakarta.

Direktur Eksekutif Walhi Yogyakarta, Halik Sandera menjelaskan, beragam kajian dan pertimbangan perlu dipikirkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) dalam menyambut perencanaan mega proyek di sisi selatan Kota Yogyakarta ini. Utamanya, pertimbangan yang harus mendasar dalam pembangunan ini adalah tetap memperhatikan sisi lingkungan.

"Fungsi yang penting dalam pembuatan *science park* adalah fungsi sosial dan ekologis," jelas Halik kepada *Tribun Jogja*, Minggu (30/7).

Dia menambahkan, keberadaan *science park* ini selain merupakan pemerataan pembangunan di sisi selatan Kota Yogyakarta, juga harus minim bangunan. Hal ini agar tidak semakin mengganggu ruang terbuka hijau (RTH) yang ada di Kota Yogyakarta.

Di sisi lain, Halik juga menyoroti



TRIBUN JOGJA/AGUNG ISMIYANTO

**CALON LOKASI** - Di lahan inilah calon lokasi *science park* atau taman iptek akan dibangun Pemkot Yogyakarta di kawasan Tegalturi, Giwangan. Foto diambil Jumat (28/7).

pembangunan embung yang direncanakan masuk dalam konsep wahanan *science park*. Walhi juga meminta Pemkot untuk melihat kembali perlunya embung di Kota Yogyakarta.

"(Pemkot) perlu melihat kembali apakah Yogyakarta membutuhkan embung? Atau kebutuhannya adalah hutan kota sehingga RTH-nya semakin maksimal," kata Halik.

Meski, Pemkot menyebut adanya embung bisa menjadi resapan dan ruang terbuka biru (RTB), namun fungsi yang penting harus bisa mendukung RTH.

● ke halaman 14

## Taman Iptek Harus Minim

● Sambungan Hal 13

Selain itu, embung tersebut harus mendukung pembangunan ruang terbuka hijau yang masih minim di Yogyakarta.

Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Kota Yogya, Muhammad Fauzan meminta Pemkot setempat perlu memperhatikan beragam aspek sosial, ekonomi maupun pelestarian sumber daya lingkungan dalam pembangunan science park. Meski demikian, dewan mendukung adanya program pemerataan pembangunan di berbagai sisi Kota Yogya.

"Kami mendukung percepatan pengembangan sisi selatan Kota Yogya," jelasnya.

Dia menjelaskan, pihaknya belum mengetahui hasil kajian Bappeda terkait dengan pengembangan sisi selatan ini, termasuk adanya science park. Meski demikian, dia menyebut, dewan pernah mewacanakan adanya pembuatan embung di utara pasar ikan higienis, Tegalturi, Giwangan. "Hal ini untuk pelestarian sumber daya air," katanya.

Kepala Bidang Fisik Badan

Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Yogyakarta, Wahyu Handoyo menjelaskan, wacana pembangunan science park ini menjadi salah satu program prioritas dalam rencana jangka menengah. Science park yang masih akan dirancang dibangun di kawasan Tegalturi ini akan mengusung konsep sebagai ruang terbuka biru.

"Nantinya, akan dilengkapi embung yang memiliki banyak fungsi selain sebagai resapan. Yakni, ada fungsi edukasi terkait persoalan air dan juga rekreasi. Mungkin hampir sama dengan taman pintar, namun konsepnya berbeda, yakni lebih berbasis pada alam atau natural," jelasnya.

Di kawasan tersebut, menurut Wahyu, pihak Pemkot juga akan mengembangkan wisata berbasis ilmu pengetahuan tentang air. Selain itu juga akan menjadi kawasan terbuka lebar yang bisa multi fungsi. Diantaranya adalah akan mendongkrak ekonomi warga di sekitar kawasan tersebut.

Disinggung adanya kawasan persawahan di lokasi calon pembangunan science park, Wahyu menyatakan, hal ini akan masuk dalam FS. Dalam pembangunan pun akan dipertimbangkan beberapa hal, termasuk bagaima-

na caranya mempertahankan RTH yang berpotensi menjadi wahana untuk science park ini.

### Minim RTH

Di sisi lain, Pemkot Yogyakarta tengah mengejar target ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Yogyakarta hingga mencapai 30 persen. Pasalnya, saat ini keberadaan RTH di Kota Yogya terus mengalami penurunan hingga menyisakan 6,09 kilometer atau 18,7 persen dari total luas wilayah Kota Yogyakarta yang mencapai 32,5 kilometer persegi.

Kepala Bidang Keindahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogya, Indiah Widiningsih Indiah menjelaskan, luasan RTH di Kota Yogya ini terdiri dari 5,83 persen atau 1,89 hektare merupakan RTH publik yang dikelola pemerintah. Sementara, 12,93 persen atau 4,2 hektare merupakan RTH privat atau yang dimiliki institusi tertentu dan perorangan.

"Berdasarkan UU nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang mengamanatkan harus memiliki RTH sebesar 30 persen," jelasnya, akhir pekan lalu.

Dia menambahkan, salah satu cara untuk mengejar target RTH 30 persen adalah dengan membangun RTH

publik di kampung-kampung Kota Yogyakarta. Dalam Perwal nomor 64 tahun 2013 disyaratkan, luas minimal RTH publik 200 meter persegi.

Dia juga menyebutkan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain juga memiliki tanggung jawab untuk membeli lahannya. Sementara, pihak DLH akan membangun tamannya. Selain itu, OPD lain juga berwenang untuk mengendalikan pembangunan di Kota Yogya.

Untuk penurunan luasan RTH, tambahnya, bukan dikarenakan adanya alih fungsi lahan terbuka tapi disebabkan adanya perubahan parameter perhitungan yang digunakan. Saat ini, perhitungan RTH menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 5 tahun 2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan.

"Perhitungan sebelumnya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan, luas RTH di Kota Jogja sudah mencapai 32 persen. Ada beberapa perubahan perhitungan dibanding Permendagri sebelumnya, seperti jalan dan sawah yang tidak ikut dihitung," ulasnya. (als)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005